ABSTRAK

Fahruddin P. Depparaga. Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara ASS dan AMPSB Di Desa Bila (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Hj. St. Nurmaeta)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara ASS dan AMPSB di Desa Bila. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatStrategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara ASS dan AMPSB di Desa Bila. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe Femonologi.Dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya.(a)Memahami Masalah,menujukkan bahwa untuk memahami masalah pemerintah dengan menerima laporan dari warga bahwa kegiatan tambang ini di luar batas yang telah di tentukan dan tidak di lengkapi dokumen perizinan tambang.(b)Merencanakan Pemecahan dengan merencanakan melakukan kunjungan ke lapangan melihat langsung kondisi di lokasi jika ditemukan kerusakan maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib selain itu melakukan investigasi oleh WALHI SulSel terkait dampak yang di rasakan terkait dampak lingkungan ,dampak sosial dan dampak ekonomi yang di alami masyarakat dan untuk sebagai kelengkapan dokumen pelaporan ke kantor polisi. (c)Melaksanakan Rencana dengan melakukan diskusi membahas perkembangan penambangan ilegal dan mendapatkan dukungan dari kepala Desa dan Kepala Camat (d) Melihat Kembali bahwa belum ada tindakan proses hukum dilakukan terkait pengerusakan lingkungan dan penambang yang ilegal dan aktivitas tambang hanya terhenti sementara waktu serta tindakan pemerintah setempat belum efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah dalam penanganan konflik antara (ASS dan AMPSB) di desa Bila bahwa faktor pendukung adanya bantuan dari berbagai pihak yang siap mendampingi masyarakat seperti Kepala Camat,Kepala Desa ,WALHI Sulsel dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara ASS dan AMPSB di Desa Bila bahwa kurangnya respon atau tanggapan Kapolres Sidrap dalam menindak lanjuti kasus tambang ilegal ini.

Kunci : Konflik Penambangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN